

## **BAB III**

### **KRISIS DIPLOMATIK DI TELUK ARAB**

Bab ini akan membahas mengenai krisis diplomatik di Teluk Arab yang terjadi pada tahun 2017. Membahas bagaimana kronologi dari fenomena krisis diplomatik di Teluk Arab pada tahun 2017 sehingga terjadi pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan krisis diplomatik di teluk Arab

#### **A. Krisis Diplomatik di Teluk Arab**

Teluk Arab merupakan sebuah kawasan yang terletak di Timur Tengah yang berisi tujuh negara yaitu, Kuwait, Bahrain, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Seluruh negara tersebut tidak termasuk Irak merupakan negara-negara yang tergabung di dalam bagian Dewan Kerjasama Negara-Negara Teluk atau yang lebih dikenal dengan *Gulf Cooperation Council* (GCC). GCC merupakan organisasi regional yang didirikan pada tanggal 25 Mei 1981 yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta sosial.

Meskipun GCC merupakan forum yang menyuarakan aspirasi, namun, sebagai negara dengan skala pertumbuhan perekonomi maupun eskalasi politik yang tinggi, kawasan Teluk Arab bukan merupakan kawasan yang tidak terdapat konflik. Qatar merupakan negara yang memiliki perbedaan pandangan maupun kebijakan dengan pemerintah Arab lainnya mengenai sejumlah isu. Qatar menyiarkan Al Jazeera yang merupakan salah satu jaringan berita terbesar di Timur Tengah dan yang telah memungkinkan Qatar untuk melakukan hegemoni terhadap pemberitaan di Timur Tengah. (Banard & Kirpatrick, 2017)

Isu-isu yang banyak diberitakan oleh Al-Jazeera merupakan isu yang terkait soal Ikhwanul Muslimin dan gerakan-gerakan yang berhaluan radikal yang dimana negara-negara di Teluk Arab tidak menyukainya. Bahkan, muncul

anggapan terkait Qatar yang memberikan izin kepada Taliban yang merupakan gerakan nasionalis bersenjata yang berasal dari Afghanistan untuk mendirikan kantornya di wilayah Qatar. (Siegeil, 2013) Dengan pemberitaan tersebut menimbulkan asumsi bahwa Qatar memberikan dukungan kepada gerakan terorisme.

Tuduhan mendukung gerakan terorisme bukan hanya menjadi isu yang memperparah keadaan Qatar di Teluk Arab namun, meningkatnya hubungan Qatar terhadap musuh besar Arab Saudi yaitu Republik Islam Iran juga menjadi isu yang menambah panas situasi di Teluk Arab. Qatar mempertahankan hubungan yang telah terjalin yang sangat baik dengan Iran. Qatar dan Iran memiliki hubungan kerjasama di sektor ekonomi terutama dalam hal kepemilikan ladang gas kondensat di Pras Selatan-Dome Utara, yang saat ini merupakan ladang gas alam terbesar di dunia. (Gambrell, 2017)

Ketegangan yang timbul di Teluk Arab bukanlah hal yang pertama kalinya terjadi. Arab Saudi yang menjadi aktor utama di kawasan Teluk Arab memiliki riwayat konflik dengan Qatar. Arab Saudi pernah melakukan penarikan terhadap duta besar mereka dari Qatar pada tahun 2002 terkait dugaan sikap kritis salah satu media yaitu Al-Jazeera terhadap pemerintah Arab Saudi. Hubungan diplomatik yang sempat memanas tersebut kembali pulih pada tahun 2008, setelah pihak Al-Jazeera memberikan jaminan akan membatasi jangkauannya di Arab Saudi. (Roberts, 2017)

Pada tahun 2014, Bahrain, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menarik duta besar mereka untuk Qatar pada tahun 2014 dengan alasan campur tangan Pemerintah Qatar terhadap urusan dalam negeri mereka. Namun pada akhirnya situasi mulai tenang setelah para anggota Ikhwanul Muslimin dipaksa oleh Qatar untuk meninggalkan negaranya dalam tenggat waktu delapan bulan. (Wintour, 2017) kelompok Ikhwanul Muslimin telah menjadi sumber perdebatan di

kawasan Timur tengah dan telah menjadi musuh bersama diantara Arab Saudi dan Amerika Serikat yang menjadi sekutunya. Ketidaknyamanan mereka akan kehadiran Ikhwanul Muslimin telah ada jauh sebelum konflik Qatar dan negara-negara di Teluk Arab ini muncul.

Pada Februari tahun 2015, hubungan diplomatik Qatar dan Mesir kembali dalam situasi yang memburuk. Memburuknya hubungan diplomatik Qatar dan Mesir terjadi setelah Angkatan Udara Mesir melakukan serangan udara terhadap ISIS yang keberadaannya dicurigai berada di negara tetangga Libya. Serangan tersebut berdampak terhadap tewasnya sekitar 21 orang. Al-Jazeera memberikan respon dengan mengutuk keras tindakan Mesir tersebut dengan menampilkan korban sipil. (Kirkpatrick D. D., 2015) Qatar kemudian dengan tegas merasa keberatan dengan serangan yang dilakukan oleh Mesir. Atas sikap Qatar tersebut memicu Tariq Adel yang merupakan delegasi Liga Arab dari Mesir melontarkan tuduhan terhadap Qatar yang terlibat dan mendukung kegiatan terorisme. Namun, Dewan Kerjasama Teluk memberikan respon dengan menolak tanggapan Tariq Adel, dan mengatakan bahwa pendapatnya tersebut salah. Dan tak lama berselang, Qatar pun memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Mesir untuk “konsultasi”. (Al-Jazeera, 2015)

Kondisi yang memanas yang telah terjadi sebelumnya mengakibatkan keadaan hubungan diplomatik negara di kawasan Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir memanas. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik oleh beberapa negara Arab dengan Qatar pada tanggal 5 Juni 2017. Pemutusan hubungan diplomatik tersebut meliputi penarikan duta besar, pemberlakuan larangan perdagangan, dan perjalanan.

Kronologi awal terkait pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi bermula pada bulan April 2017. Qatar

terlibat dalam kesepakatan dengan militan Sunni dan Syiah di Irak dan Suriah. Kesepakatan itu memiliki dua tujuan. Tujuan utamanya adalah terjaminnya pengembalian 26 sandera asal Qatar yang dimana termasuk para anggota kerajaan Qatar yang telah diculik oleh militan Syiah dan ditahan selama lebih dari 16 bulan. Tujuan kedua adalah agar militan Sunni dan Syiah di Suriah mengizinkan distribusi bantuan kemanusiaan untuk masuk dan proses evakuasi berjalan aman. kesepakatan ini memungkinkan evakuasi setidaknya 2000 warga sipil dari desa Madaya, Suriah. (Arango, 2017) Dalam kesepakatan tersebut pihak Qatar membayar sebesar \$ 1 milyar untuk memuluskan proses pembebasan 26 sandera asal Qatar tersebut. Kesepakatan itu mempertinggi kekhawatiran di antara tetangga Qatar tentang peran negara kecil yang kaya gas di suatu wilayah yang dilanda konflik dan persaingan sengit. Dan pada hari Senin negara-negara tetangga Qatar yaitu Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain mengambil langkah luar biasa untuk memutuskan hubungan diplomatik dan hubungan transportasi ke Qatar, dengan menuduh negara itu memicu ekstremisme dan terorisme. (Solomon, 2017)

Pada Tingkat Tinggi (KTT) Riyadh 2017, isu terkait pemutusan diplomatik ini mendapat perhatian serius. KTT Riyadh yang dilaksanakan pada akhir Mei 2017, dihadiri oleh banyak pemimpin dunia, termasuk salah satunya presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump yang mengunjungi kawasan ini. Trump memberikan dukungan kuat terhadap upaya yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam memerangi negara dan kelompok yang bersekutu dengan Ikhwanul Muslimin, menuju pada suatu bentuk kesepakatan senjata antara negara-negara tersebut. Dukungan Trump mungkin telah memberi keyakinan terhadap negara-negara Sunni lainnya untuk mengikuti langkah Arab Saudi untuk bersikap melawan Qatar. (Kirkpatrick D. D., 2015)

Pada Mei 2017, situs web Qatar News Agency dan platform media pemerintah lainnya diduga diretas yang mengakibatkan situasi semakin memanas. Seperti yang

dilansir oleh Al-Jazeera yang berpusat di Qatar, peretas menulis komentar palsu di Qatar News Agency yang dikaitkan dengan Emir Qatar yaitu Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Pada tulisan tersebut ia menyatakan dukungannya untuk Iran, Hamas, Hizbullah, dan Israel. (Al-Jazeera, 2017) Seperti yang dilansir oleh Al-Jazeera Kapten Othman Salem al-Hamoud (kepala divisi teknologi kementerian) mengatakan bahwa tingkat dan kualitas hacking sangat profesional sehingga harus memiliki “sumber daya negara” di belakangnya. Sebelumnya, Letnan Kolonel Ali Mohammed al-Mohannadi, mengatakan operasi hacking berlangsung berkoordinasi dengan, dan melalui, “salah satu negara pemblokir”. *“Peretas memiliki kontrol penuh atas jaringan QNA, termasuk akun terkait, situs web dan platform sosial terkait,”* kata Mohannadi. *“Peretasan ini dimaksudkan untuk membuat dan memposting laporan palsu, yang dikaitkan dengan Yang Mulia, Emir.”* Pejabat mengatakan bahwa kasus tersebut telah dirujuk ke jaksa. Serangan *cyber* tersebut dilaporkan berlangsung sekitar tiga jam, mulai dari larut malam pada 24 Mei hingga dini hari pada tanggal 25 Mei, sebelum pakar media pemerintah negara berhasil mengendalikan situs ini. Dalam sebuah sesi presentasi video, kementerian tersebut mengatakan bahwa penyidik menemukan bahwa pada awal bulan April, peretas telah melakukan penyusupan ke jaringan QNA dengan menggunakan perangkat lunak VPN dan melakukan pemindaian terhadap situs web. Kementerian tersebut mengatakan bahwa peretas melakukan eksploitasi terhadap celah dalam sistem jaringan, dan melakukan pemasangan “program jahat” yang kemudian digunakan untuk menerbitkan sebuah cerita palsu. (Islam J. , 2017)

Untuk mengakhiri segala bentuk embargo ataupun krisis diplomatik yang terjadi negara-negara di Teluk Arab membuat sebanyak tiga belas tuntutan yang diberikan kepada Qatar. (jazeera, 2017) Pertama, perkecil hubungan diplomatik dengan Iran dan tutup misi diplomatik Iran di Qatar, usir anggota Pengawal Revolusi Iran dan putus hubungan

militer dan intelijen dengan Iran. Perdagangan dan perdagangan dengan Iran harus mematuhi sanksi AS dan internasional dengan cara yang tidak membahayakan keamanan Dewan Kerjasama Teluk. Kedua, segera menutup pangkalan militer Turki, yang saat ini sedang dibangun, dan menghentikan kerja sama militer dengan Turki di dalam Qatar.

Ketiga, memutuskan ikatan dengan semua "organisasi teroris, sektarian dan ideologis," khususnya Ikhwanul Muslimin, ISIL, al-Qaeda, Fateh al-Sham (sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra) dan Hizbullah Libanon. Secara resmi Mendeklarasikan Secara resmi entitas ini sebagai kelompok teror sesuai daftar yang diumumkan oleh Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir, dan setuju dengan semua pembaruan masa depan dari daftar ini. Keempat, Hentikan semua tindakan pendanaan terhadap individu, kelompok atau organisasi yang telah ditetapkan sebagai teroris oleh Arab Saudi, UEA, Mesir, Bahrain, AS, dan negara-negara lain. Kelima, Serahkan "tokoh-tokoh teroris" yang menjadi buron dan orang-orang yang dicari dari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain ke negara asal mereka. Bekukan aset mereka, dan berikan informasi yang diinginkan tentang tempat tinggal, pergerakan, dan keuangan mereka. Keenam, tutup stasiun media Al Jazeera dan afiliasinya. Ketujuh, mengakhiri campur tangan dalam urusan internal negara yang berdaulat. Berhentilah memberikan kewarganegaraan kepada warga negara yang dicari dari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Cabut kewarganegaraan Qatar untuk warga negara di mana kewarganegaraan tersebut melanggar hukum negara-negara tersebut.

Kedelapan, Membayar reparasi dan kompensasi atas hilangnya nyawa dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya akan ditentukan dalam koordinasi dengan Qatar. Kesembilan, menyelaraskan kebijakan militer, politik, sosial dan ekonomi Qatar dengan negara-negara Teluk dan Arab lainnya, serta tentang masalah ekonomi, sesuai dengan

kesepakatan 2014 yang dicapai dengan Arab Saudi. Kesepuluh, hentikan komunikasi dengan oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Serahkan file yang merinci kontak Qatar sebelumnya dengan dan dukungan untuk kelompok oposisi, dan kirimkan detail informasi pribadi mereka dan dukungan yang Qatar berikan kepada mereka.

Kesebelas, matikan semua outlet berita yang didanai secara langsung dan tidak langsung oleh Qatar, termasuk Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed, Mekameleen dan Middle East Eye, dll. Kedua belas, Setuju dengan semua tuntutan dalam waktu 10 hari dari daftar yang diajukan ke Qatar, atau daftar tersebut akan menjadi tidak valid. Ketiga belas, persetujuan untuk audit kepatuhan bulanan pada tahun pertama setelah menyetujui tuntutan, diikuti oleh audit triwulanan pada tahun kedua, dan audit tahunan dalam 10 tahun berikutnya.

## **B. Faktor-faktor Utama Krisis Diplomatik**

### **1. Hubungan Qatar dan Ikhwanul Muslimin**

Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan Al Bana bersama tokoh lainnya yakni Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz, Ahmad Al-Khusairi, Hafiz Abdul Hamid, dan Zaki Al Maghribi pada tahun 1928 di kota Ismailiyah, Mesir (Jatmika, 2014). Sebelum mendirikan Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Bana kerap melakukan aktifitasnya dalam berdakwah.

Tujuan dari didirikannya Ikhwanul Muslimin yang tercantum didalam angaran dasarnya ialah untuk melakukan kegiatan dakwah sesuai dengan ajaran islam yang benar, mensejahterakan masyarakat dengan menjaga kekayaan negara, meningkatkan taraf hidup dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmat, 2006). Berdasarkan dari tujuan tersebut, Ikhwanul Muslimin memiliki keinginan untuk menciptakan suatu negara dengan tata kelola yang dilandaskan pada aturan-aturan sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bagi rakyat.

Namun dalam praktiknya pergerakan Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai kelompok ekstrimis yang dapat membahayakan negara.

Di beberapa negara Ikhwanul Muslimin mendapat larangan untuk terlibat pada praktik politik praktis. Misalnya di negara Mesir pada pemerintahan Presiden Mubarak, Ikhwanul Muslimin diakui sebagai organisasi keagamaan yang dimana menyebabkan Ikhwanul Muslimin tidak dapat turut serta dalam politik praktis. Dengan adanya larangan tersebut menjadikan Ikhwanul Muslimin harus melakukan koalisi dengan partai oposisi lainnya agar para anggotanya dapat mendapatkan kursi di parlemen. Sepak terjang Ikhwanul Muslimin pada masa pemerintahan Hosni Mubarak bukan tanpa konfrontasi terhadap pemerintah. Sejumlah anggota Ikhwanul Muslimin juga ditangkap dan dipenjarakan oleh aparat keamanan karena dianggap ingin mendirikan negara Islam.

Tiga negara teluk yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain menganggap pergerakan Ikhwanul Muslimin merupakan pergerakan terorisme yang menjadi ancaman bagi Teluk Arab dan sekitarnya. Anggapan itu disandarkan pada arah gerak Ikhwanul Muslimin yang mengarah pada pemikiran Sayyid Qutb. Sayyid Qutb menganjurkan perjuangan bersenjata melawan barat dan rezim korup Arab serta kaum *jahiliyya*. (Zollner, 2009, hal. 61)

Qutb menggambarkan sebuah konsep Islam yang dikenal dengan *tasawwur al-Islami* yang mengatur agar barisan pelopor dapat sukses di masa depan. Baginya itu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi *jahiliyya* modern yang dimana itu juga cara alami membangun sebuah komunitas Islam yang benar, karena itu sebuah metode (*minhaj*) yang menurutnya dirancang oleh Tuhan. Cara itu dipraktikkan oleh Muhammad untuk membimbing generasi pertama umat Islam untuk membangun komunitas yang



solid dalam sebuah periode selama tiga belas tahun. Periode ini dapat dipecah dalam fase yang berbeda. (Qutb, 1993)

Langkah pertama dari *minhaj* adalah bahwa individu menerima pengakuan iman mereka dan menyerahkan diri mereka terhadap kedaulatan mutlak Tuhan. 'Ubudiyya terhadap Tuhan awalnya berarti mencari pengetahuan, mengambil dan mengikuti hukum ilahi yang ketat. Qutb berpandangan bahwa seseorang dengan sepenuh hati mengenali Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber hukum dan sebagai panduan utama dalam pertanyaan kehidupan sehari-hari, ia dengan teguh berpaling dari *jahiliyya* dan budaya, filosofisnya dan bagasi ilmiah. Begitu menyadari iman mereka, anggota garda [elopor akan membangun sebuah kelompok aktivis organik, semacam nukleus dari kepercayaan seseorang dalam masyarakat *jahiliyya*. Contoh mereka akan menarik semakin banyak orang untuk bergabung dengan kelompok, membuatnya menjadi kekuatan yang akhirnya tidak bisa lagi diabaikan. Pada kesempatan ini komunitas akan memasuki fase kedua dari skema ilahi.

Sebagai sistem *jahiliyya* yang berkuasa tidak akan senang dengan meningkatnya jumlah Muslim sejati di tengah-tengah mereka dan mereka akan berusaha membatasi itu. Namun, pada tahap ini barisan pelopor masih terlalu kecil dan lemah untuk bisa melawan masyarakat *jahiliyya*. Satu-satunya jalan lain adalah menarik, untuk terlibat dalam hijrah (penarikan). Sama seperti Muhammad pergi kota asalnya Mekah dan berlindung di Madinah, penarikan ini adalah sarana mencegah kerusakan oleh sistem yang ditentan. Ini juga memungkinkan masyarakat muslim sejati untuk menghindari menyerah pada pengaruh dan praktik *jahiliyya*. Melalui hijrahnya, pelopor akan memperkuat struktur internal.

Tahap ketiga dimulai ketika kelompok mereka menemukan kekuatan internal dan memperkuat jumlahnya.

Struktur suara dan keyakinan kelompok memungkinkan pelopor untuk mempersiapkan konfrontasi yang diperlukan dengan masyarakat *jahiliyya*. Qutb berpikir bahwa mustahil para penguasa tiran akan menyerahkan kekuasaan mereka tanpa pertarungan. Bagi Qutb, pertempuran melawan *jahiliyya* pada tahap ini sah secara politik tidak dapat dihindari dan perlu. Dia menyatakan:

*“Berkhotbah saja tidak cukup untuk membangun kekuasaan Allah di bumi, untuk menghapuskan kekuasaan manusia, untuk mengambil kedaulatan dari perampas dan kembali kepada Allah, dan untuk membawa penegakan syariah ilahi dan penghapusan hukum buatan manusia. Mereka yang telah merebut otoritas Allah dan menindas makhluk Allah tidak akan menyerahkan kekuatan dengan hanya dengan berkhotbah.”*

Jihad (perjuangan) adalah, seperti yang bisa kita lihat dari kutipan, bagian integral dari Quthb visi konsep Islam. (Cook, 2005) Ini adalah perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan Tuhan dan dengan demikian untuk membangun sistem negara Islam yang didasarkan pada syari'ah. Karena itu sesuai dengan gagasan untuk membawa credo Muslim ('aqida) ke dalam praktik. Namun, meskipun Qutb sering menggunakan istilah jihad di tonggak sejarah, ada yang pasti ambiguitas dalam cara dia mempekerjakannya. Tergantung pada konteksnya, dan sesuai dengan tahap konsep Islam, dapat mengambil makna yang berbeda. Bermain di Gagasan tentang pengumpulan di jalan Allah, dapat melibatkan keterlibatan melalui khotbah dan belajar, itu bisa berarti bergabung dengan komunitas dalam hijrahnya dari jahiliyya, tetapi itu bisa juga berarti militansi dan perang, seperti Qutb terutama membayangkan di tahap akhir dari minhaj. Pada titik mana pun dari minhaj, barisan depan mempraktikkan jihad. Demikian, sesuai dengan tahapan dalam pengembangan pelopor Muslim sejati, sebuah perintah untuk jihad yang berkembang:

*... Muslim pertama kali ditahan dari pertempuran; lalu mereka diizinkan untuk melawan; kemudian mereka diperintahkan untuk melawan para penyerang; dan Akhirnya mereka diperintahkan untuk melawan semua orang musyrik.*

Ideologi Ikhwanul Muslimin yang cenderung membahayakan kawasan Teluk Arab dan sekitarnya juga keputusan melakukan embargo terhadap Qatar juga didasarkan pada penolakan Qatar untuk mengekstradisi tokoh Ikhwanul Muslimin yang berasal dari Mesir yaitu Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi. Rabu, 17 Januari 2018, pengadilan Mesir menjatuhkan hukuman mati kepada delapan orang serta 17 oarang lainnya yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup termasuk Syeikh Yusuf Al-Qardahwi. Syeikh Yususf didakwa dengan tuduhan melakukan penghasutan untuk membunuh dan penyebaran berita palsu, dan merusak properti publik pada peristiwa kekerasan di Mesir pada saat unjuk rasa penggulingan presiden Morsi. (Dwinanda, 2018)

Menurut laporan *Middle East Monitor*, Qatar tidak ingin melakukan ekstradisi kepada Syeikh Yusuf AL-Qardhawi karena menilai Syeikh Yusuf hanyalah musuh politik bagi pemerintahan Mesir dan tidak ada sangkut pautnya dengan gerakan terorisme. Menteri Hubungan Luar Negeri Qatar yaitu Al-Thani mengatakan, “*Al-Qaradhawi tidak akan diekstradisi karena dia telah menjadi warga negara Qatar sejak 1970-an. Dia juga bukanlah seorang teroris melainkan hanya lawan politik yang memiliki sudut pandang yang berbeda.*”

Al-Thani juga menambahkan, ”*Informasi yang membuat beberapa negara anggota Dewan Kerjasama Teluk dan Mesir memasukkan Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah kelompok teroris tidak sesuai dengan informasi yang dimiliki Qatar. Karena itu kami belum mendaftarkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris.*”

Al Thani menjelaskan bahwa, *“Kami tidak akan memperbolehkan mereka [anggota Ikhwanul Muslimin] untuk terlibat dalam aktivitas politik apapun di Qatar atau untuk menggunakan negara kami sebagai sebuah titik awal dalam menyerang atau menghina negara-negara mereka.”*

Pemerintah Qatar menjelaskan bahwa mereka tidak mendukung Ikhwanul Muslimin namun mendukung rakyat Mesir. Dukungan itu ditunjukkan dengan Qatar yang belum menarik investasinya di Mesir yang berjumlah sekitar \$20 miliar, *“karena mereka [investasi] berguna bagi rakyat Mesir dan berkontribusi dalam menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi Mesir”*. Pemerintah Qatar percaya bahwa jika Mesir tetap kuat, maka akan memberikan dampak yang positif bagi Dunia Arab. (AR, 2017)

## **2. Hubungan Qatar dan Iran**

Dalam hubungan bilateral Qatar dan Republik Islam Iran telah terjalin hubungan yang baik. Qatar memiliki Kedutaan Besar di Teheran dan Iran memiliki Kedutaan Besar di Doha. Dalam bidang ekonomi Qatar dan Iran memiliki hubungan yang sangat hangat. Hubungan yang sangat hangat terutama dalam hal industri minyak dan gas bumi. Sebagian besar pasokan minyak Qatar berasal dari ladang minyak yang terhubung dari Iran.

Qatar dan Iran sama-sama memiliki ladang Gas Kondensat Selatan Pars-North Dome, ladang gas tersebut merupakan ladang gas terbesar di dunia, yang memiliki pengaruh besar dalam hubungan Qatar dan Iran (Fulton, 2010). North Field dan South Pars yang biasa juga disebut Lapangan Utara (Qatar) dan Pars Selatan (Iran) berlokasi di antara batas Qatar dan Iran. Ladang gas tersebut mencakup 97.000 km persegi dengan mayoritas yaitu sekitar dua pertiga yang terbentang di perairan Qatar (Times, 2009). Kontrol terhadap ladang gas alam tersebut dilakukan secara kolektif atau bersama-sama oleh Qatar dan Iran. Qatar yang memiliki sebanyak 13 % cadangan gas di dunia dan

memproduksi sebanyak 650 juta meter kubik gas per hari dari bagian ladangnya, sedangkan Iran dapat memproduksi hingga sebanyak 5.750 juta meter kubik gas dari ladangnya tersebut (World, 2015).

Pada tahun 2014, dalam upaya yang bertujuan untuk memperluas hubungan perdagangan dan ekonomi dilakukan bersamaan dengan dilakukannya penandatanganan pada beberapa protokol keamanan. Kedua negara mengumumkan terkait pembentukan tiga zona perdagangan bebas gabungan yang dimana satu terletak di kota pelabuhan Bushehr yang terletak di Iran dan dua lainnya terletak di Qatar yaitu di kota Doha dan pelabuhan Al-Ruwais. Pada tahun 2015, perputaran transaksi perdagangan antara Qatar dan Iran diperkirakan sebesar sekitar \$ 500 juta (Kamrava, 2017, hal. 167-187)

Hubungan erat di kedua negara tetap berlanjut meskipun Arab Saudi dan beberapa negara di Teluk Arab tidak menyukainya. Qatar malah membangun ikatannya sendiri dengan memutuskan untuk memperkuat hubungan dengan Iran yang tentu tak disukai Arab Saudi. Menurut Jim Krane yang merupakan peneliti energi dari Rice University's Baker Institute di Texas, negara-negara yang berada di kawasan ini sedang berupaya mencari kesempatan untuk mematahkan 'sayap' Qatar. (Debora, 2017) Berdasarkan pandangan Jim Krane tersebut dapat diasumsikan bahwa negara-negara yang merupakan tetangga Qatar berusaha melemahkan Qatar.

Qatar dan Iran juga saling menjalin hubungan yang cukup baik pada bidang keamanan seperti halnya, Menteri Dalam Negeri Iran yang mengumumkan bahwa Iran telah melakukan penandatanganan terkait kesepakatan keamanan dengan Qatar. Menurut laporan kesepakatan tersebut membahas terkait perlindungan perbatasan, memerangi kejahatan terorganisir, perdagangan manusia, dan obat-

obatan yang dimana semuanya merupakan tujuan dari diadakannya kesepakatan tersebut.

Setelah adanya kesepakatan tersebut Komando Pasukan Pelindung Garda Revolusi Islam (IRGC-N) yaitu Ali Reza Tangsiri melakukan pengumuman bahwa IRGC telah melakukan pengiriman armada kapal ke Qatar melalui sebuah “misi observatorium angkatan laut”. Armada yang dikirim tersebut terdiri dari tiga kapal PT yang telah dilengkapi dengan rudal dan dua kapal pendukung. Delegasi IRGC tersebut dijadwalkan dan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas militer Qatar.

Perluasan dalam bidang keamanan juga dilakukan yang dimana terdapat kesepakatan yang di tandatangani oleh kedua pihak yang membahas terkait perbatasan kedua negara tersebut dan juga kesepakatan tersebut dirancang sebagai upaya untuk memperbaiki pengendalian perairan territorial.

kerjasama di bidang budaya juga pernah dilakukan oleh Qatar dan Iran ysgn dimana kedua negara tersebut saling mengadakan pertukaran kebudayaan, yang dimana Qatar pernah menjadi tuan rumah pameran seni yang berasal dari Iran. Pameran yang diadakan tersebut berjudul “*A Manifestation of Iranian Art*”, karya-karya yang dipajang selama pameran tersebut berasal dari seniman asal Iran yaitu Morteza Atash-Panjeh. Dalam pameran tersebut menampilkan sekitar 40 karya yang dimana karya-karya tersebut merupakan seni tradisional yang berasal dari Iran (Project, 2017)

Hubungan Qatar dan Iran sempat memburuk disaat krisis diplomatik Iran yang terjadi pada awal tahun 2016, dimana negara-negara yang berada di kawasan Teluk memutuskan hubungannya dengan Iran menyusul serangan terhadap misi diplomatik Arab Saudi di Iran. Krisis diplomatik Iran terjadi karena adanya aksi pemberontakan

dan penyerangan yang dilakukan sejumlah warga Iran di kantor kedutaan besar Arab Saudi di Teheran, warga Iran tersebut tidak terima dengan putusan hukuman mati terhadap ulama syiah asal Iran yaitu Nimr al-Nimr, akibat dari adanya penyerangan tersebut membuat beberapa Negara di kawasan Teluk memilih untuk memutuskan hubungan diplomatik terhadap Negara Iran. (BBC, 2016)

Pada Kamis, 24 Agustus 2017 Qatar akan mengembalikan hubungan diplomatik penuh dengan Republik Islam Iran. Kementerian Luar negeri Qatar memberi pernyataan, "*Negara Qatar mengumumkan hari ini (Kamis, 24/8/2017) bahwa duta besarnya untuk Teheran akan kembali menjalankan tugas diplomatiknya,*" (Saju, 2017)

Perluasan hubungan bilateral terus dilakukan, Hassan Rouhani yang merupakan presiden Republik Islam Iran menyinggung terkait perluasan hubungan komprehensif Iran dengan Qatar. Rouhani menuturkan bahwa Republik Islam tidak akan membiarkan rakyat Muslim negara Qatar di bawah tekanan yang tidak adil. Ahmed bin Abdullah yang merupakan Ketua Parlemen Qatar memberi apresiasi terhadap posisi dan dukungan efektif Iran kepada pemerintah dan rakyat negaranya. Ahmed bin Abdullah berkata, "*Saat ini hubungan Qatar dan Republik Islam Iran terjalin atas dasar bertetangga yang baik dan harus diupayakan agar hubungan kedua negara diperluas.*" (Today, 2018)